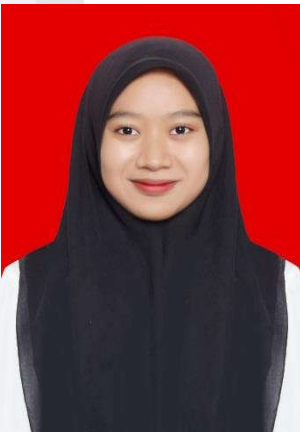




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TENTANG PENETAPAN TARIF  
TRANSFER TUNAI MELALUI BANK  
(Studi BRILink Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten  
Labuhanbatu, Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**MIRA  
NIM 11722200683**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1442 H /2021 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi BRILink Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara) yang ditulis oleh:

Nama : Mira  
NIM : 11722200683  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 Juli 2021**

Pembimbing Skripsi



**Drs. H. Zainal Arifin, Ma**  
NIP. 196507041994021001

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank, BRILink Desa Tanjung Haloban Kec Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara”**, yang ditulis oleh:

Nama : MIRA  
NIM : 11722200683  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Daring / online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Agustus 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si**

Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji I  
**Ahmad Adri Rifa'I, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Zulfahmi Bustami, MA**

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
NIP. 197410062005011005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT:**

Mira (2021): **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TENTANG PENETAPAN TARIF TRANSFER TUNAI MELALUI BANK (Studi BRILink Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara)”**.

Upah merupakan imbalan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sehingga dapat dengan mudah melakukan pekerjaan seperti menjadi agen BRILink. Menjadi agen BRILink adalah melayani transaksi keuangan layaknya kantor Bank pada umumnya, tetapi bedanya dalam usaha ini agen tidak perlu memiliki kantor, usaha ini bisa dikerjakan di rumah. Transaksi yang dilakukan beberapa agen BRILink ini menimbulkan permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu bagaimana penetapan tarif yang diberikan Bank BRILink pusat terhadap agen BRILink serta jasa yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah hukum Islam terhadap penetapan tarif transfer kepada Bank BRILink pusat terhadap agen BRILink serta jasa yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan pengamatan. Dan kemudian data yang sudah di analisa dengan menggunakan teori metode sosiologi empiris. Penelitian ini didasari oleh observasi terhadap kenyataan dan akal sehat. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua warga desa Tanjung Haloban. Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling sebanyak 4 agen BRILink dan 35 nasabah BRILink. Sumber data dalam penelitian ini adalah, primer, skunder dan tersier, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian di agen BRILink Tanjung Haloban bahwa perjanjian yang dilakukan antara Agen BRILink pusat dengan agen BRILink adalah sistem bagi hasil atau imbal jasa sesuai kesepakatan. Dan transaksi yang dilakukan antara agen BRILink dan nasabah adalah sistem upah mengupah. Sistem penetapan tarif yang dilakukan agen BRILink adalah sistemnya ditetapkan sendiri oleh agen sesuai kesepakatan dengan BRILink Pusat. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan penulis, akad sistem upah mengupah ini hukumnya diperbolehkan dan sah karena telah sejalan dengan hukum Islam.

**Kata Kunci:** BRILink, Ijarah, Jasa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur hanya tertuju pada Allah SWT semata, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul ***Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank, BRILink Desa Tanjung Halaban Kec Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara***. Shalawat dan salam dimohonkan kepada Allah SWT, semoga senantiasa tercurah buat arwah junjungan umat sedunia, yaitu Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit halangan dan rintangan yang penulis alami. Semua itu terjadi karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, sikap, waktu, dan dana yang ada pada diri penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, kepada bapak yang tersayang Supriatin yang telah berjuang untuk mencari nafkah dan selalu mencurahkan kasih sayang kepada kami anak-anaknya semasa hidupnya dan mamak tersayang Sukini, terima kasih atas do'a, nasehat, cinta, kasih sayang,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didikan, kepercayaan, dan pengorbanan mamak untuk ananda, tanpa mereka ananda bukanlah siapa-siapa.

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan dan seluruh jajarannya.
4. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Henrizal Hadi, Lc, M.A yang senantiasa meluangkan waktunya untuk saya selama dalam perkuliahan.
6. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA, yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Terimakasih juga kepada kakak kandung saya, Yeni Wati dan Sri Rahayu yang telah membantu saya sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini dalam hal materi, fisik, dan kasih sayang sepanjang saya mengikuti pendidikan.
9. Bapak Andi Rahman selaku kepala desa Tanjung Haloban yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian sampai selesai.
10. Bapak Jonaidi Nasution selaku Agen BRILink desa Tanjung Haloban, Bapak Jali, Ibu Meli, Ibu Yeni, Bapak Sukatno, Bapak Sumarlin, dan Ibu suida, serta semua responden yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.
11. Pegawai pustaka UIN Suska Riau, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
12. Kepada sahabat Ahmad Alfandi Batubara, Tria Wardani, Kendedes Fitriyani, Anzu Elfani, Nanda Lia yang telah memberikan duku baik moril maupun materil yang sudah tidak terhitung banyaknya.
13. Teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu khususnya Muamalah B, serta para senior dan junior Jurusan Hukum Ekonomi motivasi lainnya.

Penulis yakin banyak dari pihak-pihak yang lain yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini. Mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkannya,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis tetap mengucapkan ribuan terima kasih. Akhirnya kepada Allah  
juaan penulis berserah diri dan mohon ampunan atas segala kesalahan dan  
kekurangan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau serta bagi para pembaca  
umumnya.

Pekanbaru,  
28 Juli 2021, Penulis

**Mira**  
11722200683



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL; .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat .....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Bank BRI.....	15
B. Sejarah Terbentuknya BRILink. ....	20
C. Panduan umum lokasi penelitian.....	22
D. Keadaan Sosial Masyarakat.....	24
E. Pendidikan.....	26
F. Kehidupan Beragama.....	27
G. Keadaan Ekonomi.....	27
<b>BAB III LANDASAN TEORI</b>	
A. Perbankan Dalam islam.....	29
B. Penetapan Harga.....	29
1. Penetapan Harga Menurut Ekonomi Islam .....	32
2. Ketentuan Harga Dalam Islam .....	32
C. Hukum Tentang Ijarah, Muamalah, dan Riba .....	33
1. Ijarah.....	33
2. Muamalah.....	40
3. Riba .....	45
D. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	48
1. Dasar Hukum OJK .....	48
2. Produk Laku Pandai Menurut POJK Nomor 19/POJK.03 /2014.....	50
3. Kegiatan Layanan Agen .....	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hak dan Kewajiban Agen .....	53
---------------------------------	----

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Penetapan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRILink serta jasa yang diberikan Agen BRILink terhadap nasabah .....	70
B. Tinjauan Fiqih Muamalah Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Jasa yang diberikan Bank BRILink Pusat Terhadap Agen BRILink serta Jasa Yang Diberikan Agen BRILink Terhadap Nasabah .....	73

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 2.1</b>	Batas Geografis Desa Tanjung Haloban.....	23
<b>Tabel 2.2</b>	Jumlah Penduduk Menurut Umur Desa Tanjung Haloban .....	23
<b>Tabel 2.3</b>	Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Haloban .....	25
<b>Tabel 2.4</b>	Data Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung Haloban .....	26
<b>Tabel 2.5</b>	Data jumlah Pemeluk Agama Desa Tanjung Halobaan .....	27
<b>Tabel 2.6</b>	Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Haloban .....	27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri karena membutuhkan orang lain dalam menjalani hidup sebagai kebutuhan jasmani dan rohani. Saling berinteraksi untuk tercapainya kemajuan bersama, terutama dalam menjalankan perekonomian mereka (bermuamalah). *Mu'amalah* sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. *Mu'amalah* merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri. Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup.<sup>1</sup> Dengan demikian manusia harus saling tolong-menolong untuk tercapainya kepentingan dan tujuan masing-masing yang tentunya tidak keluar dari aturan-aturan *syara'*.

Firman Allah yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS.Al-Maidah (5) :2)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal 7.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI., Al-qur'an Terjemah. (Jakarta: Cahaya Qur'an )

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut diketahui bahwa tidak ada manusia yang dapat menjalankan/memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa campur tangan atau bantuan orang lain. Seperti halnya pedagang tidak akan mendapatkan uang jika tidak ada pembeli, sopir angkutan umum tidak akan mendapat penghasilan jika tidak ada penumpang, Tiki maupun Kantor Pos tidak akan mendapatkan jasa pengiriman barang dan BRILink tidak mendapatkan jasa dari pengiriman uang dari masyarakat yang menggunakan jasa tersebut. Empat hal tersebut terdapat keterkaitan, ketergantungan/ saling membutuhkan satu sama lain.

Contoh lain dari bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam Fiqih Islam disebut *Ijarah*. Kegiatan upah mengupah pada umumnya yang sering didengar yaitu upah jasa, memang hal itu juga salah satu bentuk upah yang ada dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu bentuk upah juga tidak hanya sebatas pada kegiatan produksi saja, namun terdapat dalam kegiatan seperti halnya distribusi, yang pada umumnya dikenal dengan sebutan ongkos. Ongkos atau upah dalam bahasa Arab disebut *ujrah* merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam agama Islam selama memenuhi syarat dan rukunnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Az-Zukhruf (43): 32).

هُمْ يَقْسِمُونَ بِرَبِّكَ ۖ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ۖ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا ۚ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian

yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S Az-Zukhruf (43): 32)<sup>3</sup>.

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa setiap manusia membutuhkan manusia lainnya walaupun derajat dalam hal dunia lebih tinggi dari manusia lainnya sebagaimana kutipan terjemah ayat tersebut “dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain”. Upah bisa disebut juga dengan kontrak kerja, atau memanfaatkan jasa seseorang baik dalam keahlian, tenaga, dan waktu yang diberikan.<sup>4</sup> Seperti contoh bengkel, *cleaning service*, pengantar barang, dan lain sebagainya.

Ada yang disewa tenaganya dalam hal ini hanya sebatas memanfaatkannya saja tidak bisa menjadi pemilik. Memasuki era digitalisasi, layanan jasa perbankan berkembang dengan pesat mengikuti kebutuhan *customer* yang semakin beragam dan menginginkan bentuk layanan perbankan yang mudah, cepat, dan aman. Jasa perbankan yang dimaksud tersebut adalah suatu kegiatan yang bersifat tak teraba (*intangible*), dimana pemenuhannya tidak lagi terikat pada penjualan produk atau jasa lain. Banyak kemudahan dalam mentransfer uang, agen jasa pengiriman uang yang lebih cepat, praktis dan tidak perlu antri seperti hal yang di Bank Umum, jasa tersebut merupakan salah satu usaha yang dikembangkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang disebut BRILink. BRILink adalah mesin gesek kartu yang dapat digunakan untuk menerima transaksi pembayaran (*purchase*) dengan kartu

<sup>3</sup> Departemen Agama RI., Al-qur'an Terjemah. (Jakarta: Cahaya Qur'an )

<sup>4</sup> Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), h. 121

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kredit, kartu debit, dan kartu *prepaid* yang diletakkan di setiap *merchants* (toko/swalayan mitra BRI).

BRILink merupakan layanan agen laku pandai milik Bank BRI. Dengan menggandeng pihak ketiga dalam hal ini nasabah BRI sebagai agen, agen BRILink memberikan berbagai layanan perbankan bagi masyarakat, baik nasabah BRI maupun non-nasabah BRI melalui pemanfaatan teknologi digital. Tujuan utama dari agen BRILink adalah untuk memberikan pelayanan perbankan khususnya kepada masyarakat yang belum terlayani oleh Bank secara administratif (*unbanked* atau *unbankable*).

Melalui agen BRILink, nasabah BRI maupun masyarakat umum lainnya bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya di kantor BRI. Biaya transaksi yang dikenakan oleh Bank pada menu mesin EDC (*Electronic Data Capture*) BRILink yaitu transfer sesama BRI Rp. 3.000,00 Transfer antar Bank Rp. 15.000,00 Setor pasti Rp. 3.000,00 dan Pembayaran PLN/ Telkom Rp. 3.000,00 jenis-jenis transaksi tersebut adalah yang terdapat pada menu ini ATM sedangkan pada menu tunai tidak dikenakan biaya<sup>5</sup>. Selain biaya transaksi nasabah juga masih dikenakan biaya agen BRILink sebesar Rp 10.000, sebagai contoh nasabah ingin mengambil uang Rp. 500.000,00 di BRILink maka akan menerima uang sebesar Rp. 490.000,00 atau membrikan upah sebesar Rp. 10.000, dan jika nasabah ingin mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,00 maka nasabah harus membayar Rp. 513.000 jika dilakukan sesama BRI.

<sup>5</sup> <http://agenbrilink.wordpress.com/2018/05/27/apa-itu-brilink-dan-agen-brilink/>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan survey nasabah pengguna BRILink di Desa Perkebunan Semah Kecamatan Bilah Hilir bahwa agen BRILink memasang upah biaya transfer Rp. 10.000,00 sedangkan berdasarkan survey nasabah orang di BRILink Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir bahwa agen BRILink memasang upah biaya tarik tunai Rp.12.000,00, upah biaya belum ditambah biaya transfer dan lainnya. Uraian diatas terjadi ketidakjelasan tarif yang diterapkan agen kepada nasabah. Sehingga, penyusun tertarik meneliti ini karena dalam pengambilan upah terdapat ketidakseragaman yang dilakukan dari pihak agen. Hal ini dijadikan kesempatan oleh para agen BRILink untuk mendapat keuntungan yang lebih. Padahal dalam Hukum Islam telah dijelaskan bahwa muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas yakni mengenai **“Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank, BRILink Desa Tanjung Haloban Kec Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara”**.

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka pembahasan dalam penelitian ini akan di fokuskan pada masalah Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui

<sup>6</sup> H. Asmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah , cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 2017), h. 88.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank, BRILink Desa Tanjung Haloban Kec Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

**C. Rumusan Masalah**

Bagaimana penetapan tarif transfer yang ditetapkan BRILink Pusat terhadap Agen BRILink serta jasa yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah di Desa Tanjung Haloban Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu?

Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Hukum Islam terhadap penetapan tarif transfer kepada BRILink pusat terhadap agen BRILink serta jasa yang diberikan agen BRILink terhadap nasabah?

**D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini diantaranya :

Apakah ada perbedaan Transaksi BRILink di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah?

Apakah yang menyebabkan perbedaan pada penetapan biaya administrasi di BRILink?

**E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Keperluan Teoritis



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, tentang akad transaksi penetapan tarif transfer tunai melalui BRILink.
- b. Dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah jurusan Muamalah pada khususnya, selain itu diharapkan menjadi stimulasi bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

#### 2. Keperluan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, dan juga dapat menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian sosiologi empiris. Penelitian sosiologi adalah ilmu pengetahuan ini didasari oleh observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, dan hasilnya tidak bersifat spekulatif. Sedangkan penelitian empiris yaitu penelitian lapangan, dengan mengkaji data primer.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Analisis yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kesuatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.<sup>7</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Bahan Data Primer

Sumber utama yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian untuk menganalisa pokok permasalahan. Bahan data primer yang penulis gunakan adalah Hukum Perdata Islam, Al-Qur'an, Hadist. Dalam penelitian ini sumber primer adalah :<sup>8</sup>

- 1) Pimpinan Bank BRILink Pusat
- 2) Agen BRILink
- 3) Nasabah pengguna BRILink

#### b. Bahan Hukum Sekunder

<sup>7</sup> Kaelan, M.S, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: Paradigma, 2015) Hal 58

<sup>8</sup> Susiadi AS, Metodologi penelitian, (Pusat Penelitian dan Penertiban IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014), h.65.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahan hukum sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku buku, hasil hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Bahan hukum sekunder penulis peroleh dari refensi buku-buku, atau tulisan yang berkaitan dengan analisa ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berasal dari buku-buku penunjang seperti ensiklopedia Islam dan kamus.

#### 4 Tempat Penelitian

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tanjung Haloban dengan jumlah 347 kk, dengan 4 agen BRILink.<sup>9</sup>

##### b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang teliti. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana. Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa untuk sekedar ancer-ancer apabila subjek kurang dari seratus lebih baik diambil semua. Tetapi jika jumlah subyeknya besar, dapat di ambil antara 10-15 % dari jumlah populasi. Proses pengambilan

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2010) h.173



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling dan kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian itu yaitu :

- 1) Agen BRILink di Desa Tanjung Haloban Kec. Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.
- 2) Nasabah pengguna BRILink / Masyarakat Tanjung Haloban Kec. Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan kriteria tersebut dalam penelitian ini diambil sampel 4 Agen BRILink dan 35 Nasabah pengguna BRILink yaitu sekaligus pelaku dalam melakukan transaksi tarif transfer tunai melalui BRILink.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah di ketahui sebelumnya.

##### Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

##### Dokumentasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitian yang berkaitan permasalahan yang diteliti.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi, dokumen yang dimaksud yaitu tentang penerapan tarif yang diberikan BRILink pusat terhadap Agen BRILink serta tarif yang diberikan Agen BRILink terhadap nasabah.

#### 6. Pengolahan Data

Secara umum pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

- a) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Dan pemeriksaan ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti setelah data tersebut terkumpul.<sup>11</sup>
- b) *Rekontruksi* data yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian<sup>12</sup>.
- c) Sistematik data bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dengan cara

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto Ibid, h.236

<sup>11</sup> Susiadi AS, Metodologi penelitian, (Pusat Penelitian dan Penertiban IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014) h.122

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Arifin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107

melakukan pengelompokan data yang telah di edit dan kemudian diberi tanda menurut kategori dan urutan masalah.

#### 7. Analisis Data

Hasil pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya akan dibahas dengan analisis secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan/menguraikan sesuatu hal atau fenomena yang telah terjadi menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya. Dilakukan dengan mengumpulkan data tentang penerapan tarif yang diberikan Bank BRILink Pusat usat terhadap Agen BRILink serta tarif/jasa yang diberikan Agen BRILink terhadap nasabah disertai analisa untuk diambil kesimpulan. Pola pikir yang dipakai adalah induktif yaitu merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan hasil kenyataan yang terjadi di lapangan dalam penerapan tarif yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRILink serta tarif yang diberikan Agen BRILink terhadap nasabah.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menulis dan menyelesaikan penelitian serta untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan dari penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan kedalam lima bab sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

## BAB II

## BAB III

## BAB IV

### PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis kemukakan gambaran umum tentang lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis Desa Tanjung Haloban, letak demografis Desa Tanjung Haloban, sosial ekonomi Desa Tanjung Haloban, dan sejarah berdirinya BRI/BRILink, visi misi BRI/BRILink, Struktur BRI/BRILink.

### TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI DAN HUKUM KEUANGAN DALAM BANK LINK

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang Perbankan dalam Islam yang terdiri dari: Perbankan dalam Islam, produk perbankan dalam Islam, Hukum Islam tentang Ijarah, Muamalah, dan Riba dan praturan tentang OJK Nomor 19/PJOK.03/2014 tentang layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab keempat merupakan inti penelitian, bagaimana penetapan tarif transfer yang diberikan BRILink pusat terhadap Agen BRILink serta jasa yang diberikan agen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BRILink terhadap nasabah di Desa Tanjung Haloban Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, serta bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Hukum Islam terhadap penetapan tarif transfer pada Bank BRILink pusat.

## PENUTUP

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berpijak dari hasil penelitian.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Bank BRI

Pada masa sebelum kemerdekaan Bank-Bank di Indonesia masih dalam kuasa negara Belanda. Mereka mendirikan Bank-Bank untuk kepentingan kelompok dan prekonomian mereka sendiri. Di masa saat itu Indonesia sangat terpuruk, terlebih dalam dunia usaha. Kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai petani banyak juga yang hanya menjadi buruh. Bank-bank asing tidak sudi memberikan pinjaman kepada masyarakat Indonesia dengan alasan tidak menguntungkan serta pengambilan kredit yang kecil.

Di Indonesia Bank saat ini merupakan bagian dari sistem ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung terutama pada aspek permodalan. Dalam hal ini artinya seseorang bisa saja melibatkan dengan suatu perjanjian secara langsung atau bisa juga melalui pihak ketiga untuk meminjam sejumlah modal/uang untuk mengembangkan sebuah usaha maupun untuk kepentingan keuangan lainnya. Hal ini sesuai dengan salah satu kegiatan Bank yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kembali.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 1. Lahirnya BRI<sup>13</sup>

Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu Bank tertua di Indonesia yang telah berjasa membangun Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga merupakan salah satu Bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Ara Wirjaatmadja dengan nama The Purwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyai Purwokerto” suatu lembaga yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia “Priyai”. Lembaga tersebut berdiri pada tanggal 16 Desember tahun 1895 yang kemudian dijadikan hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan Indonesia RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor.1 Tahun 1946 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang memperahankan kemerdekaan Indonesia, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan mulai aktif lagi setelah terjadinya perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan perubahan nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.

Pada waktu itu melalui PERPU Nomor 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Netherland Handel Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres

<sup>13</sup> <https://bri.co.id>

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham Bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini. BRI juga telah menjadi peningkatan kinerja positif diatas rata-rata hingga akhir periode triwulan akhir 2018 dengan penyaluran kredit diatas rata-rata. Lalu BRI juga telah banyak melakukan kegiatan amal seperti mengirimkan bantuan kepada korban gempa dan tsunami disulawesi tengah. Banyak prestasi dari BRI yang bisa dibanggakan sebagai salah satu Bank terbesar di Indonesia.

Pada tahun 2018 lalu, BRI merayakan ulang tahunnya yang ke-123 dan meluncurkan produk-produk digital Bank terbaru. Produk-produk tersebut pada akhirnya akan memperkuat komitmen BRI untuk masuk sebagai Bank digital dan membantu semua transaksi yang berbasis digital. Selain itu BRI Juga sempat mendukung industri infrastruktur nasional dan telah dinobatkan oleh Global Finance sebagai Bank terbaik di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut.faktor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi pertimbangan Global Finance untuk penilaian diantaranya aset, laba, layanan perbankan, inovasi, dan pricing yang kompetitif.

## 2. Visi dan Misi BRI

Adapun visi dan misi BRI adalah sebagai berikut :

- a. Visi : Menjadi the best valuable Bank di Asia Tenggara dan home to the best talent
- b. Misi : 1) Memberikan yang terbaik, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. 2) Menyediakan pelayanan prima. 3) Bekerja dengan optimal dan baik

## 3. Nilai Dasar Perusahaan

- a. Integrity Integrity yang memiliki makna senantiasa berpikir, berkata, dan berperilaku terpuji, menjaga kehormatan, serta taat aturan. Perilaku yang menunjukkan nilai integrity adalah terbuka, jujur, dan tulus serta patuh terhadap peraturan.
- b. Professionalism Professionalism yang memiliki makna senantiasa berkomitmen bekerja tuntas dan akurat dengan kemampuan terbaik dan penuh tanggung jawab. Perilaku yang menunjukkan nilai professionalism adalah continuous learner dan fairness.



c. Trust Trust yang memiliki makna senantiasa membangun keyakinan & saling percaya di antara para pemangku kepentingan demi kemajuan Perseroan. Perilaku yang menunjukkan nilai trust adalah saling menghargai & mengutamakan kepentingan Perseroan dan Negeri.

d. Innovation Innovation yang memiliki makna senantiasa mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menemukan solusi dan gagasan baru untuk menghasilkan produk/ kebijakan dalam menjawab tantangan permasalahan Perseroan. Perilaku yang menunjukkan nilai innovation adalah visioner dan pionir perubahan.

e. Customer Centric Customer Centric yang memiliki makna senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan. Perilaku yang menunjukkan nilai customer centric adalah melayani lebih dari ekspektasi nasabah dengan setulus hati dan collaborative.

#### 4. Sikap Prilaku Insan BRI

- Jujur, dapat dipercaya dan taat pada aturan
- Selalu menjaga kehormatan dan nama baik pribadi dan perusahaan
- Handal, prudent, disiplin dan bertanggung jawab
- Berorientasi ke masa depan
- Sebagai panutan dan berjiwa besar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Tegas dalam menindaklanjuti adanya penyimpangan
- g. Memberikan pelayanan yang terbaik dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan
- h. Terampil, ramah, senang melayani
- i. Memperlakukan pekerja secara terbuka, adil, saling menghargai
- j. Mengembangkan sikap kerja sama dalam menciptakan sinergi untuk kepentingan perusahaan.

Seluruh informasi mengenai sejarah berdirinya BRI (Bank Rakyat Indonesia) dapat ditemukan pada museum BRI yaitu ditempat asal didirikannya Bank ini yaitu Purwokerto, Jawa Tengah. Museum tersebut memiliki koleksi yang cukup unik dan sangat bermanfaat sebagai informasi pembelajaran. Contohnya berupa koleksi uang kertas asing, pakaian dan aksesoris pendiri Bank Rakyat Indonesia itu sendiri, uang kertas dan logam lama, diorama, uang logam asing, mesin pembukuan dan lainnya.

## **B. Sejarah Terbentuknya BRILink**

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) meluncurkan layanan BRILink yaitu layanan keuangan tanpa kantor (nirkantor). Program ini merupakan bagian dalam rangka mendukung program-program pemerintah salah satunya financial inclusion.

Pada tahun 2012 pemerintah beserta Bank Indonesia sudah mempersiapkan perencanaan branchless Banking atau layanan perbankan tanpa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mengandalkan kantor cabang dan menggunakan teknologi untuk mencapai para nasabahnya. Menindaklanjuti masalah tersebut pada tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi otoritas dalam pengawasan perbankan dan lembaga keuangan, kemudian meluncurkan program LAKU PANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif).

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kemudian menindaklanjuti layanan ini menggunakan dengan meluncurkan program BRILink. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi BRI karena BRI memiliki nasabah diseluruh Indonesia hingga kedaerah pelosok negeri. Dengan BRILink, BRI bisa mencapai nasabahnya yang di area yang terpencil, tanpa harus membangun kantor diarea tersebut.

Layanan BRILink ini, merupakan sebuah inovasi dalam dunia keuangan khususnya perbankan untuk mempermudah akses kepada masyarakat yang belum memiliki layanan perbankan. BRILink merupakan perluasan dari BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani perbankan bagi masyarakat secara real online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep Sharring fee.

Bank BRI menyediakan layanan keuangan nirkantor hingga ke pelosok dan wilayah perbatasan. Layanan BRILink yang berbasis keagenan ini tidak hanya memberikan manfaat efisiensi operasional, namun juga memberikan kemudahan transaksional bagi masyarakat. Baik yang sudah menjadi nasabah Bank BRI maupun yang belum menjadi nasabah Bank BRI.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BRILink mulai dikenalkan pada masyarakat pada tahun 2015, yang pada akhirnya menjadi bisnis Bank BRI. Latar belakangnya adalah, Bank BRI ingin memberikan pelayanan yang mampu menjangkau keseluruhan pelosok dan semua kalangan, terutama mereka yang unbanked. Bank BRI memang sudah mempunyai unit-unit kecil di ujung-ujung tanah air, namanya Teras BRI. Ternyata itu belum cukup menjangkau semua. Sejalan dengan keinginan ara regulato, dalam hal ini Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka Literasi keuangan, Bank BRI hadir dengan BRILink. Setelah dibuka pada tahun 2015 BRILink mendapat respon yang sangat baik oleh masyarakat.

Pada tahun pertama dibuka BRILink mempunyai 50 ribu agen, ditahun berikutnya agen bertambah lagi 50 ribu agen, jadi pada dua tahun pertama BRILink sudah mempunyai 100 ribu agen yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia. Kemudian ditahun 2017, dilihat dari animo masyarakat yang cukup bagus Bank BRI memutuskan untuk menambah desain baru, kalau sebelumnya agen BRILink itu menggunakan mesin EDC, pada 2017 kami ganti dengan menggunakan aplikasi dismartphone.

#### C. Panduan umum lokasi penelitian

Desa tanjung haloban terletak di kecamatan Bilah Hilir kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara, dengan kode.

Adapun batas wilayah desa Tanjung aloban dapat di lihat di tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Batas Geografis Desa Tanjung Haloban**

No	Batas Daerah	Keterangan
1	Sebelah Utara	Kecamatan Panai Hulu
2	Sebelah Selatan	Desa Sei Kasih
3	Sebelah Timur	Desa Sei Tarolat
4	Sebelah Barat	Kabupaten Labuhanbatu Utara

Dari tabel di atas dapat di lihat Desa Tanjung Haloban memiliki batas administratif dengan posisi sebelah utara Kecamatan Panai Hulu, sebelah selatan dengan Desa Sei Kasih, sebelah timur dengan Desa Sei Tarolat dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Desa Tanjung Haloban memiliki luas wilayah sebesar 7.051 km<sup>2</sup> dengan memiliki hutan adat sebesar 5 ha.

Desa Tanjung Holoban setidaknya memiliki jumlah penduduk sebesar 5.111 dengan jumlah penduduk laki laki sebanyak 2.579 dan jumlah perempuan sebesar 2.534 dengan jumlah kepala keluarga laki laki sebesar 1.392, Kepala keluarga Perempuan sebesar 315, dan Kepala keluarga Miskin sebesar, 466.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Umur Desa Tanjung Haloban.**

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	a. <1 tahun	350
2	b. 1-4 tahun	710

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kelompok Umur	Jumlah
3	c. 5-14 tahun	1150
4	d. 15-39 tahun	1953
5	e. 40-64 tahun	600
6	f. 65 tahun ke atas	350
Jumlah		5113

Dari tabel di atas dapat di peroleh umur masyarakat Desa Tanjung Haloban termasuk dalam <1 tahun sebanyak 350 orang (Laki-Laki dan Perempuan), 1-4 tahun sebanyak 750 orang (Laki-Laki dan Perempuan), 5-14 tahun sebanyak 1150 orang (Laki-Laki dan Perempuan), 15-19 tahun sebanyak 1953 orang (Laki-Laki dan Perempuan), 40-64 tahun sebanyak 600 orang (Laki-Laki dan Perempuan), 65 tahun keatas 350 orang (Laki-Laki dan Perempuan).

#### D. Keadaan Sosial Masyarakat

Desa Tanjung Haloban memiliki jumlah suku sebanyak 4 yaitu:

Jawa  
Batak  
Melayu dan  
Minang.

Jumlah etnis beragama di Desa Tanjung Haloban dapat di lihat dalam tabel berikut.

Desa Tanjung Haloban memiliki sistem pemerintahan yang berada dalam tabel berikut:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.3**  
**Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Haloban**

No	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tnjung Haloban	
1	Kepala Desa	: Andi Rahman
2	Sekretaris Desa	: Dini Sulistia
3	Kaur Keuangan	: Khairul Fatah
4	Kaur Umum	: Jefri Sulardi
5	Kaur Perencanaan	: Basuki
6	Kasi Pemerintahan	: Mesran
7	Kadus Saroha	: Syahlon
8	Kadus Sidorejo	: Miswan
9	Kadus Sidodadi 1	: Aminudin
10	Kadus Sidodadi 2	: Sargianto
11	Kadus Tanjung Halnoban 1	: Mulyadi sitorus
12	Kadus Tanjung Rejo	: Prayetno
13	Kadus Tanjung Haloban 2	: Ruslan Nasution
14	Kadus Kampung Tengan 1	: Kapen S.P
15	Kadus Kampung Tengan 2	: Riman
16	Kadus Kampung Tengah 3	: Andi Suwito
17	Kadus Sei Kelapa 1	: Manarsar Sitorus
18	Kadus Sei Kelapa 2	: Sugeng
19	Kadus Sei Buluh	: Harles Simbolon

Sistem Pemerintahan Desa Tanjung Haloban Yang Di Atur Oleh Kepala Desa Andi Rahman, Sekretaris Desa Dini Sulistia, Kaur Keuangan Khairul Fatah, Kaur Umum, Jefri Sulardi, Kaur Perencanaan Basuki, Kasi Pemerintahan Mesran, Kadus Saroha Syahlon, Kadus Sidoarjo Miswan, Kadus Sidodadi 1 Aminudin, Kadus Sidodadi 2 Sardianto, Kadus Tanjung Haloban 1 Mulyadi Sitorus, Kadus Tanjungrejo Prayitno, Kadus Tanjung Haloban 2 Ruslan Nasution, Kadus Kampung Tengah Kapen S.P, Kadus Kampung Tengah 2



Riman, Kadus Kampung Tengah 3 Andi Suwito, Kadus Sei Kelapa 1 Manarsar Sitorus, Kadus Sei Kelapa 2 Sugeng Dan Kadus Sei buluh Charles Simbolon.

## E. Pendidikan

**Tabel 2.4**  
**Data Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung Haloban**

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah SD	281	140	421
2	Tamat SD/Sederajat	432	361	793
3	Tamat SMP/Sederajat	388	427	815
4	SMA/SMK/Sederajat	1875	1209	3084
<b>Jumlah</b>		2976	2137	5113

Dapat dilihat pada tabel diatas tingkat pendidikan dikategorikan tidak bersekolah tamat sekolah dasar Tamat sekolah menengah pertama dan SMA dan SMK. pada tiga pendidikan yang belum bersekolah atau tidak tamat sekolah Sekolah derajat yaitu sebanyak 281 laki-laki dan 140 perempuan, pada tingkat pendidikan hanya tamat sekolah dasar laki-laki berjumlah 432 dan perempuan berjumlah 361, pada tingkat pendidikan Tamat sekolah menengah pertama atau sederajat laki-laki yaitu 388 dan perempuan 427, pada tingkat pendidikan tamat SMA sederajat sebanyak 1875 laki-laki dan 1209 perempuan. Data ini tergolong pada tingkat seluruh umur atau warga masyarakat yang ada di Desa Tanjung haloban dengan tingkat pendidikannya masing-masing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Kehidupan Beragama

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Pemeluk Agama Masyarakat Desa Tanjung Haloban**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3534
2	Kristen Protestan	1557
3	Katholik	22

Pada tabel diatas jumlah pemeluk agama di Desa Tanjung Haloban. jumlah pemeluk agama Islam berjumlah 3534 orang (Laki-laki dan Perempuan), jumlah pemeluk agama Kristen Protestan berjumlah 1557 (Laki-laki dan Perempuan) orang dan jumlah pemeluk agama Katolik berjumlah 22 orang (Laki-laki dan Perempuan) Di Desa Tanjung Haloban memiliki jumlah rumah ibadah sebanyak 20 rumah ibadah yang dibagi dengan 5 masjid, 6 mushola, dan 9 gereja yang tersebut pada 13 dusun Desa Tanjung Haloban.

## E. Keadaan Ekonomi

**Tabel 2.6**  
**Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Haloban**

No	Jenis Pekerjaan	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	1000	50	1050
2	Nelayan	80	0	80
3	PNS	90	10	100
5	Pegawai Swasta	50	30	80
6	Wiraswasta	700	50	750
7	TNI	5	0	5
8	Polri	2	0	2
9	Dokter	1	0	1
10	Bidan	0	25	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Jenis Pekerjaan	Laki laki	Perempuan	Jumlah
11	Prawat swasta	5	5	10
	Jumlah	1933	170	2103

Dapat dilihat dari tabel diatas kondisi ekonomi masyarakat desa Tanjung Haloban Memiliki pekerjaan yang bermacam-macam. di Desa Tanjung Haloban memiliki jumlah petani sebanyak 1050 orang, nelayan sebanyak 80 orang, pegawai negeri sipil sebanyak 100 orang, pegawai swasta sebanyak 80 orang, wiraswasta sebanyak 750 orang, TNI sebanyak 5, orang polisi sebanyak 2 orang, dokter sebanyak 1 orang, dan bidan sebanyak 25 orang dan perawat swasta sebanyak 10 orang.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pekerjaan yang banyak ditekuni di Desa Tanjung Haloban yaitu berupa petani., baik petani kelapa sawit padi maupun Kakao. Selain itu karena berdekatan dengan Sungai bilal warga Desa Tanjung Haloban juga memiliki profesi sebagai nelayan. Selain sebagai petani dan sebagai nelayan Kebanyakan warga Desa Tanjung Haloban bekerja sebagai wiraswasta atau pengusaha dikarenakan lokasi Desa Tanjung Haloban tidak memiliki pabrik dan perkebunan besar swasta sehingga tidak memiliki buruh pabrik maka itu itu kebanyakan dari mereka memilih untuk menjadi wiraswasta atau pengusaha kecil-kecilan. baik pengusaha warung toko dan bahan baku bangunan dan lain sebagainya





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI DAN HUKUM KEUANGAN DALAM BANK LINK

#### A. Perbankan Dalam islam

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang.

Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin. Fungsi Bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang.

Rasulullah SAW yang dikenal julukan *al Amin*, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayyidina Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya<sup>1</sup>. dalam konsep ini, yang dititipkan tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.

*Islam* sebagai ajaran *Ad-din* mengandung ajaran yang komprehensif dan sempurna. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi islam. Tegasnya, agama diserahkan kepada Allah ialah penyerahan diri yang sesungguhnya kepada Allah. Jadi Walaupun seseorang mengaku beragama islam, kalau dia tidak menyerahkan yang sesungguhnya kepada Allah, belumlah dia Islam, sebab dia belum

menyerah/tunduk. Penyerahan diri inilah yang akan membawa keselamatan dan kebahagiaan hidup bagi manusia<sup>14</sup>.

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu Bank konvensional dan Bank syariah.

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan Bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif)<sup>15</sup>.

## B. Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari suatu perusahaan. Penetapan harga saling berkaitan antara permintaan dan biaya serta dipengaruhi oleh persaingan yang berbeda-beda. Dengan penetapan harga

<sup>14</sup> Andrianto, SE., M. Manajemen Bank Syariah (Surabaya: Qiara Media 2019) hal 2

<sup>15</sup> <http://www.ojk.go.id>

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Penetapan harga adalah penentuan harga jual produk suatu perusahaan, dimana perusahaan dalam menentukan harga jual produk tersebut harus menentukan terlebih dahulu modal dan total biaya yang dikeluarkan sehingga dapat menetapkan harga jual produk. Dengan penentuan harga maka perusahaan dapat meminimalisir resiko yang terjadi dan mendapatkan keuntungan yang lebih.<sup>16</sup>

Menurut Ali Hasan, Penetapan posisi harga merupakan cara untuk membedakan penawaran dari pesaing, usaha meraih kesuksesan membentuk kualitas sama dengan pesaing tetapi harga lebih rendah/murah. Oleh karena itu, sebelum penjualan dilakukan, retailer harus menentukan harga jual yang paling tepat ialah dengan cara:

- a. Hitung beberapa harga beli per-unit produk dari pemasok
- b. Tentukan berapa tingkat persentase keuntungan yang ingin diperoleh dari per-unit produk yang dijual.
- c. Survei atau lihat berapa harga jual per-unit produk yang sama pada pesaing.
- d. Lihat dan pelajari harapan konsumen
- e. Pilihan strategi penetapan harga.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Jilid 2*, (Jakarta: PT. Indexs, 2007), h. 102

<sup>17</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 144-145



## 1. Penetapan harga menurut Ekonomi Islam

Teori harga dalam ekonomi islam adalah teori harga penyerahannya kepada sistem pasar yang ditentukan oleh masyarakat pasar. Maksudnya Islam pada dasarnya tidak ikut campur tangan apalagi menetukannya secara konkrit dalam menetapkan harga. Karena islam menyerahkan dalam menetapkan harga ini sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Termasuk dalam mengambil keuntungan berupa persen keuntungan yang diperoleh dari modal yang telah dikeluarkan.<sup>18</sup> Jadi, dalam penetapan harga menurut ekonomi islam, hak sepenuhnya dalam menentukan harga ialah pedagang atau perusahaan.

Berdasarkan pada hadits Nabi saw yang tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat itu harga melambung tinggi. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra, yang artinya: *“Diriwayatkan dari Anas RA, pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, harga-harga barang naik di kota Madinah, kemudian para sahabat meminta Rasulullah SAW menetapkan harga. Maka Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah SWT Dzat Yang Maha Menetapkan harga, yang Yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah SWT tanpa seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kedzaliman dalam darah dan harta.”* (HR. Abu Dawud)

## 2. Ketentuan Harga Dalam Islam

Penentuan harga atau jasa dalam islam merupakan penentuan harga atau

<sup>18</sup> Muhamad Amin Suma, *Menggali Akar Menggurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h. 184

yang wajar akan menjadi penentuan yang benar, karena dasar teori harga dalam islam adalah prinsip koperasi dan persaingan yang sehat, bukannya persaingan monopoli seperti di bawah ekonomi kapitalis, persaingan ini tidak berarti persaingan sempurna tetapi persaingan yang bebas dari penimbunan, penyeludupan.<sup>22</sup> Selain itu, berdasarkan prinsip kejujuran karena islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun serta prinsip keterbukaan dan keadilan.<sup>23</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil(tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (Q.S. An- Nisa'[4]: 29)<sup>19</sup>

### C. Hukum tentang Ijarah, Muamalah dan Riba

#### 1. Ijarah

Kata ijarah berasal dari kata ajr yang berarti imbalan. Dengan pengertian semacam ini, pahala dinamakan dengan ajr. Dalam syariat, yang dimaksud dengan ijarah adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan. Dengan demikian, menyewa pohon untuk dimakan buahnya tidak sah, karena pohon bukanlah manfaa, juga tidak diperbolehkan menyewa emas dan perak, menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang pada umumnya ditakar dan ditimbang karena semua ini tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan

<sup>19</sup> Departemen Agama RI., Al-qur'an Terjemah. (Jakarta: Cahaya Qur'an )

menghabiskanrly. juga tidak diperbolehkan menyewa sapi, kambing atau unta untuk diprerah susunya karena penyewaan memberikan kepemilikan atas suatu manfaat. Sementara dalam hal ini, ia memberikan mantaat atas susu yang merupakan benda, padahal akad penyewaan berlaku pada manfaat bukan pada benda. Suatu manfaat memiliki banyak rmacam. Pertama, manfaat benda, seperti penghunian rumah dan pemakaian mobil. Kedua, manfaat pekerjaan, seperti pekerjaan arsitek, tukang barngunan, tukang tenun, tukang celup, tukang jahit, dan tukang setrika. Dan ketiga, manfaat orang yang mengerahkan tenaganya, seperti pembantu dan buruh.

#### a. Dasar Hukum Ijarah

Dasar-dasar hukum atau rujuka ijarah adalah Al-quran, Al- sunnah dan Al-ijma'.

1. Dasar hukum ijarah dalam Al quran adalah:

يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم  
فَسَتَرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ۖ

Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka (Al-Thalaq:

6)<sup>20</sup>

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari wanita itu berkata:” wahai bapakku, ambilah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk di jadikan pekerja kita adalah orang yang kuat dan dapat di percaya (Al-Qashash: 26)<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI., Al-qur'an Terjemah. (Jakarta: Cahaya Qur'an )



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar hukum ijarah dari al hadist adalah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”( Riwayat Ibnu Majah).

“berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”(Riwayat Bukhari dan Muslim).

“dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud).

3. Landasan ijma’ nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

#### b. Rukun Ijarah

Dalam Fatwa Dewan Syariah nasional nomor 09/DSNMUI/ IV/2000

Tentang Pembiayaan Ijarah dijelaskan ketentuan ketentuan Ijarah sebagai berikut:

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

<sup>21</sup> Departemen Agama RI., Al-qur’an Terjemah. (Jakarta: Cahaya Qur’an )

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Pernyataan ijab dan qabul.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (Lessor, Pemilik Aset, LKS), dan penyewa (Lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
3. Obyek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
4. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
5. Syarat Ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari Pemilik Aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
  2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
  3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
  4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
  5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
  6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya.
- Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam Ijarah.

8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.

9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketika : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa:

- a. Menyediakan aset yang disewakan.
- b. Menanggung biaya pemeliharaan aset.
- c. Menjaminan bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.

2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa:

- a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
- b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materiil).
- c. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa<sup>22</sup>

**c. Macam macam upah ijarah**

Dalam perjanjian fiqh muamalah upah dapat dibedakan menjadi

<sup>22</sup> Wiroso( Produk perbankan syariah, Jogyakarta:LPPE USAKT I 2011) hal 267



dua, yaitu

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- 2) Upah yang sepadan (*ajrun mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kongsi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya<sup>23</sup>.

#### d. Syarat Bagi Orang yang Berakad

Orang yang melakukan akad ijdrah disyaratkan memiliki kemampuan; mereka berdua berakal dan mumap'iz. Ika salah satu dari kedua orang yang berakad ini gila atau rnasih kecil dan belum mumalyiz, maka akad yang adadakannya tidak sah. Ulama mazhab Syaf i dan Hambali mensyaratkan balig. Menurut mereka, akad yang dilakukan anak kecil tidak sah meskipun dia sudah mumayiz.

#### e. Prinsip-Prinsip Pokok Transaksi al-Ijarah Menurut Islam

Prinsip-prinsip pokok al-ijarah haruslah dipenuhi oleh seseorang dalam suatu transaksi al-ijarah yang akan dilakukakannya. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah

1. Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal sehingga dibolehkan melakukan transaksi al-ijarah untuk keahlian memproduksi barang-barang

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:1997), hlm. 156

keperluan sehari-hari yang halal seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Namun tidak dibolehkan transaksi al-ijarah untuk keahlian membuat minuman keras, membuat narkoba dan obat-obat terlarang atau segala aktifitas yang terkait dengan riba.

2. Memenuhi syarat sahnya transaksi al-ijarah yakni

(a) Orang-orang yang mengadakan transaksi ajiir dan musta'jir) haruslah sudah mumayyiz yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk sehingga tidak sah melakukan transaksi alijarah jika salah satu atau kedua pihak belum mumayyiz seperti anak kecil.

(b). Transaksi atau akad harus didasarkan pada keridaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur paksaan.

3. Transaksi ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Ijarah adalah memanfaatkan sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajir, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga untuk mengontrak seorang ajir tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumannya fasid (rusak). Dan waktunya juga harus ditentukan, misalkan harian, bulanan, atau tahunan. Disamping itu upah kerjanya harus ditetapkan. Karena itu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam transaksi ijarah ada hal-hal yang harus jelas ketentuannya yang menyangkut: (a). bentuk dan jenis pekerjaan (nau al-amal). (b). Masa kerja<sup>24</sup>

## 2. Muamalah

Pengertian muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. menurut bahasa, muamalah berasal dari kata *ammala yu'amilu, mu'amalatan* artinya sama dengan wajan: *mufa'ala yu'ailu mufaalatan* artinya sering bertindak sering bertindak saling berbuat dan saling mengamalkan<sup>25</sup>.

Kata muamalah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis dan semakna dengan kata al-mufa'alah ( saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memnuhi kebutuhan masing-masing. Dalam reaksi lain disebutkan muamalah di defenisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan –persoalan kedunian. Misalnya, dalam persoalan julan beli, utang piutang, kerja sama dagang, sewa menyewa dan lain-lain<sup>26</sup>.

1. Pengertian fiqh muamalah menurut terminologi, berikut beberapa defenisi fiqh muamalah. Menurut para ulama dan ahli:

<sup>24</sup> M. Shalahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam (Ed. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) h. 1

<sup>26</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group:2015) h.2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Menurut Ad-Dimyati

Aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi

Menurut Muhammad Yusuf Musa

peraturan peraturan Allah yang diikuti dan di taati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia

Menurut Hudhari Beik

Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat

d. Menurut Idris Ahmad

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dengan usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmanisnya dengan cara yang paling baik<sup>27</sup>.

b. Prinsip-Prinsip Muamalah

1. Prinsip Tauhidi (Unily)

Yaitu dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat islam. Setiap bangunan yang aktivitas kehidupan manusia harus di dasarkan pada

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) hal 1.



nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa setiap gerak serta rangka bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan<sup>28</sup>.

## 2. Amanah

Yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Misalnya dalam membuat laporan keuangan dan lain lain.

## 3. Masalahah.

Adalah sesuatu yang di tunjukan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Seluruh investasi yang memungkinkan keuntungan yang bersifat sementara khirnya akan mendatangkan kerugian bagi semua pihak yang hendaklah di tinggalkan. Investasi yang seperti ini di anggap oleh Allah SWT investasi yang merusak dan tidak membawa *masalahah* pada umat islam pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

## 4. Prinsip Ibadah (Boleh)

Bahwa berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditentukan dalil yang melarangnya. Kaidah-kaidah syara' yang perlu diperhatikan

- a. Senantiasa berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya.

<sup>28</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group:2015) h.8



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. Mengetengahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.
- c. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.

#### 5. Prinsip Halal

Umat islam dalam mencari rezeky di harapkan dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang haram, melaksanakan hal-hal yang halal, dalam cara memperoleh dalam menngonsumsi dan dalam memanfaatkannya. Doa yang berinvestasi secara halal akan di terima oleh Allah dan hidupnya penuh makna dalam ridho Allah SWT. Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.

#### 6. Prinsip Keadilan (*Justice*)

Sebagai uapaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara parapihak yang melakukan muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (*nisbah*) anata pemilik modal dan pengelola modal

#### 7. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip ini harus di dasari prinsip suka sama suka atau (*antradin minkum*) dan tidak ada pihak yang di dzolimi dengan di dasari akad-akad yang sah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Transaksi yang di maksud tidak boleh dilakukan pada produk produk yang haram seperti, babi, organ tubuh manusia, pornografi dan sebagainya<sup>29</sup>.

#### a. Dasar Hukum muamalah

Muamalah dalam Islam berlandaskan pada asas-asas dan kaidah umum asas dan kaidah yang masih bersifat umum ini memberikan ruang gerak yang bebas bagi para mujtahid dan teoritisi hukum islam untuk melakukan ijtihad dan kajian dalam rangka pengembangan fiqh muamalah yang konstekstual sesuai perkembangan zaman. Hukum dasar muamalah adalah halal. Adanaya prinsip ini untuk berinovasi dan berkreasi dalam bermuamalah dan mengembangkan aktivitas ekonomi Islam memberikan peluang dan kebebasan kepada umatnya

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya :”maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (Q.S Al-Baqarah: 279)<sup>30</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa muamalah dilaksanakan dengan menelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsurunsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan.

<sup>29</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenamedia: 2013) hlm. 7

<sup>30</sup> Departemen Agama RI., Al-qur'an Terjemah. (Jakarta: Cahaya Qur'an )



### 3. RIBA

Dari sisi kebah'asaan, kata riba berarti tambahan. Sementara yang dimaksud riba dalam hal ini adalah tambahan pada pokok harta, baik sedikit maupun banyak<sup>31</sup>.

#### Macam-macam riba

##### 1. Riba fadhl

Iyalah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjual belikan. Iyalah yang diperjual belikan sejenis berlebih timbangan pada barang-barang yang ditakar dan berlebihan ukuran pada barang-barang Yang Ditakar Pertukaran semacam ini mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidak jelasan ini dapat menimbulkan tindakan dzalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak lain. Dalam perbankan riba fadhl dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (spot)<sup>32</sup>.

##### 2. Riba nasiah

Iyalah riba yang membayarnya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundur kan, sedangkan riba fadhl semata-mata berlebihan pembayaran. baik sedikit maupun banyak. Nasiah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasiah muncul karena adanya perbedaan,

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) hal .56

<sup>32</sup> Hendi Suhendi ibid., hal 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Statistik Islam  
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan kemudian. Jadi untung muncul tanpa adanya risiko, hasil usaha muncul tanpa ada biaya. Padahal dalam bisnis selalu ada untung dan rugi. Itulah yang terjadi dalam riba nasih yakni terjadi perubahan sesuatu yang sehat.

Tetapi jika kamu bertaubat maka kamu berhak atas pokok hartamu kamu tidak berbbuat zholim merugikan dan kamu tidak di zholimi dirugikan (AL Baqarah(2) 279)

### 3. Hukum riba

Riba diharamkan oleh seluruh agama samawi, Dianggap membahayakan agama Yahudi Nasrani dan Islam. di perjanjian lama disebutkan bahwa jika kamu mengqiradkan Harta kepada salah seorang Putra bangsaku, janganlah kamu bersikap seperti orang yang menguntangkan jangan kamu meminta keuntungan untuk hartamu ayat 25 pasal 22 Kitab Keluaran. jika saudaramu membutuhkan sesuatu maka tanggung lah jangan kamu meminta darinya keuntungan dan manfaat ayat 35 pasal 25 kitab Imanat Alquran menyinggung masalah riba dalam berbagai tempat dan tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu. turun firman Allah yang berbunyi:

وَمَا أَتَيْنُكُمْ مِّن رَّبٍّ لَّا يَرْبُؤَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْنُكُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ

artinya nya: “Menambah pada sisi Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah maka yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya” Quran surah (Ar Rum ayat 39)<sup>33</sup>.

Pada periode Madinah turun ayat yang mengharamkan riba secara jelas-jelas yaitu seperti tercantum pada surah Ali Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

yang artinya “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan melipatgandakan dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”<sup>34</sup>.

Riba di sini ialah riba nasiah. menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasiah itu selamanya haram walaupun tidak berlipat ganda. riba itu ada dua macam nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran yang lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. sedangkan riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis Tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian seperti penukaran emas dengan emas padi dengan padi dan sebagainya. dimaksud dalam ayat ini ialah riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI., Al-qur'an Terjemah. (Jakarta: Cahaya Qur'an )

<sup>34</sup> Departemen Agama RI., Al-qur'an Terjemah. (Jakarta: Cahaya Qur'an )

## **D. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)**

### **1. Dasar Hukum OJK**

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 telah membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran (fairness). Secara kelembagaan OJK berada diluar pemerintahan, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah<sup>35</sup>.

OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan pemeriksaan, dan penyidikan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Lembaga tersebut melaksanakan kegiatan disektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Dalam Official website [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) disebutkan bahwa Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Adapun Misi OJK adalah :

- 1) mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil dan transparan dan akuntabel; 2) mewujudkan sistem keuangan

<sup>35</sup> Penjelasan paragraf 10 Undan-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; 3) melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat<sup>36</sup>. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia pengelolaan pendanaan dan kepemilikan sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di kegiatan jasa keuangan sektor perbankan OJK mempunyai wewenang<sup>37</sup>.

1. Pengaturan dan pengawasan diperbankan meliputi :

- a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor Bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
- b. Kegiatan usaha Bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk, hibridasi dan aktivitas di bidang jasa. Berdasarkan pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Tugas pengawasan Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang”.<sup>38</sup> Maka dibentuklah lembaga OJK dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>36</sup> Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah (Jakarta: Rajagrafindo Persada:2017) hlm. 28

<sup>37</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>38</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia





Dalam hal ini Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi tugas dan wewenangya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap Bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap Bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada lembaga OJK.

## 2. Produk Laku Pandai Menurut POJK Nomor 19/POJK.03/2014

Lembaga Jasa Keuangan dapat menyediakan produk-produk dan berbagai macam layanan dalam penyelenggaraan Laku Pandai. Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan produk-produk yang dapat disediakan Lembaga Jasa Keuangan Laku Pandai, antara lain:<sup>39</sup>

- a. Tabungan Tabungan yang dimaksud adalah tipe tabungan yang memiliki karakteristik Basic Saving Account (BSA). Karakteristik yang dimaksud antara lain sebagai berikut :
  - 1) Hanya dapat dimiliki oleh perorangan
  - 2) Dalam mata uang rupiah
  - 3) Setiap melakukan transaksi debet rekening berupa penarikan tunai , pemindahan buku dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
  - 4) Batas maksimum transaksi debet rekening sebagaimana dimaksud ditetapkan Bank lebih besar dari Rp5.000.000,00 dalam satu bulan namun tidak boleh

<sup>39</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), h.4

lebih besar dari Rp60.000.000,00 dalam satu tahun secara kumulatif dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank

- 5) Dibeaskan dari pembebanan biaya untuk administrasi bulanan, pembukuan rekening, transaksi penyetoran tunai, transaksi transfer masuk, transaksi pemindahbukuan, dan penutupan rekening
- 6) Biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan dan biaya lainnya, ditetapkan oleh Bank dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler
- 7) Mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah)
- 8) Dan lain sebagainya

b. Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro, karakteristiknya sebagai berikut:

- 1) Jangka waktu kredit atau pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun
- 2) Jangka waktu kredit atau pembiayaan dapat lebih lama dari 1 tahun sepanjang sesuai dengan siklus usaha debitur
- 3) Batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Bank wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif kepada nasabah mikro sebagaimana dimaksud ialah paling sedikit 70% dari total portopolio kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dalam rangka Laku Pandai

c. Asuransi mikro, ialah produk asuransi yang ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah. d. Produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Kegiatan Layanan Oleh Agen

Dalam rangka penyelenggaraan Laku Pandai, kegiatan layanan yang dapat dilakukan agen terhadap nasabah atau calon nasabah harus sesuai dengan cakupan layanan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama, yaitu antara lain :<sup>40</sup>

- a. Transaksi terkait tabungan dengan karakteristik BSA, meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening
- b. Transaksi terkait kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro meliputi penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pokok
- c. Transaksi terkait tabungan selain tabungan dengan karakteristik BSA meliputi penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, dan/atau transfer dana
- d. Transaksi terkait jasa keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku

Agen pelaksana Laku Pandai hanya dapat melayani nasabah atau calon nasabah disekitar wilayah tempat kedudukan agen yang mencapai desa atau setara desa lain disekitarnya. Penetapan wilayah yang dimaksud harus disesuaikan dengan kewajaran jarak dan waktu tempuh, biaya perjalanan menuju lokasi agen, atau lokasi topologi wilayah.

Sebagai agen Laku Pandai, mereka pun dapat memasarkan produk atau layanan jasa keuangan lainnya sepanjang telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait produk dan layanan keuangan yang dipasarkan. Selain itu, juga

<sup>40</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), h.11



memberitahukan kepada Bank Penyelenggara Laku Pandai yang telah bekerjasama dengan agen. Namun agen juga dituntut untuk tetap bisa memberikan layanan yang baik kepada nasabah dengan agen.

#### 4. Hak dan Kewajiban Agen

Dalam bermuamalah antara BRI dengan agen BRILink terdapat akad-akad yang dijalankan, yaitu suatu kesepakatan atau perjanjian kerjasama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kerjasama tersebut dituangkan dalam perjanjian secara tertulis, antara lain memuat:<sup>41</sup>

##### 1. Hak dan kewajiban Bank penyelenggara dan Agen

###### a. Hak Bank Penyelenggara antara lain:

- 1) Meminta laporan kepada agen
- 2) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap agen

###### b. Kewajiban Bank Penyelenggara antara lain

- 1) Memberikan imbal jasa kepada agen
- 2) Menyediakan sistem aplikasi untuk penyelenggara laku pandai
- 3) Melakukan edukasi dan pelatihan

###### c. Hak Agen antara lain

- 1) Menerima imbal jasa dan mendapatkan pembinaan
- 2) Memperoleh pelatihan dan edukasi dari Bank penyelenggara

###### d. Kewajiban Agen antara lain

- 1) Menjaga kerahasiaan Bank Penyelenggara dan data pribadi nasabah

<sup>41</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 bagian VII. Edukasi dan Perlindungan Nasabah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- 2) Melaksanakan SOP yang ditetapkan Penyelenggara termasuk dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan agen tidak dapat beroperasi
- 3) Mematuhi Ketentuan penyelenggara Laku Pandai yang berlaku bagi Bank Penyelenggara
- 4) Menyampaikan laporan kepada Bank penyelenggara termasuk dalam hal terdapat nasabah yang dicurigai melakukan tindakan yang terkait dengan kejahatan terorisme, atau penyaluran obat-obatan terlarang.

1. Mekanisme dan hubungan kerja antara Bank penyelenggara dan agen antara lain:

- a. Struktur dan besaran imbal jasa yang dapat berupa komisi/fee dan tata cara pemberian imbal jasa kepada agen
- b. Jenis electronic device yang ditetapkan dan sistem yang disiapkan oleh Bank penyelenggara untuk digunakan oleh agen

- c. Dan lain sebagainya. Produk dan layanan pada BRILink dalam perjanjiannya dilakukan dengan akad ijarah atau ujarah yaitu imbal jasa. Upah (Ijarah) merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk kepemilikan manfaat (jasa) dari seorang mu`ajir oleh seorang musta`jir yang dijelaskan disengaja dengan memberikan pengganti (kompensasi/upah). Imbal jasa tersebut adalah antara pihak Bank penyelenggara BRILink dengan agen. Seperti yang sudah dijelaskan pada perjanjian kerjasama yang dituangkan secara tertulis diatas.

- Mekanisme imbal jasanya adalah berupa besaran komisi/fee. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

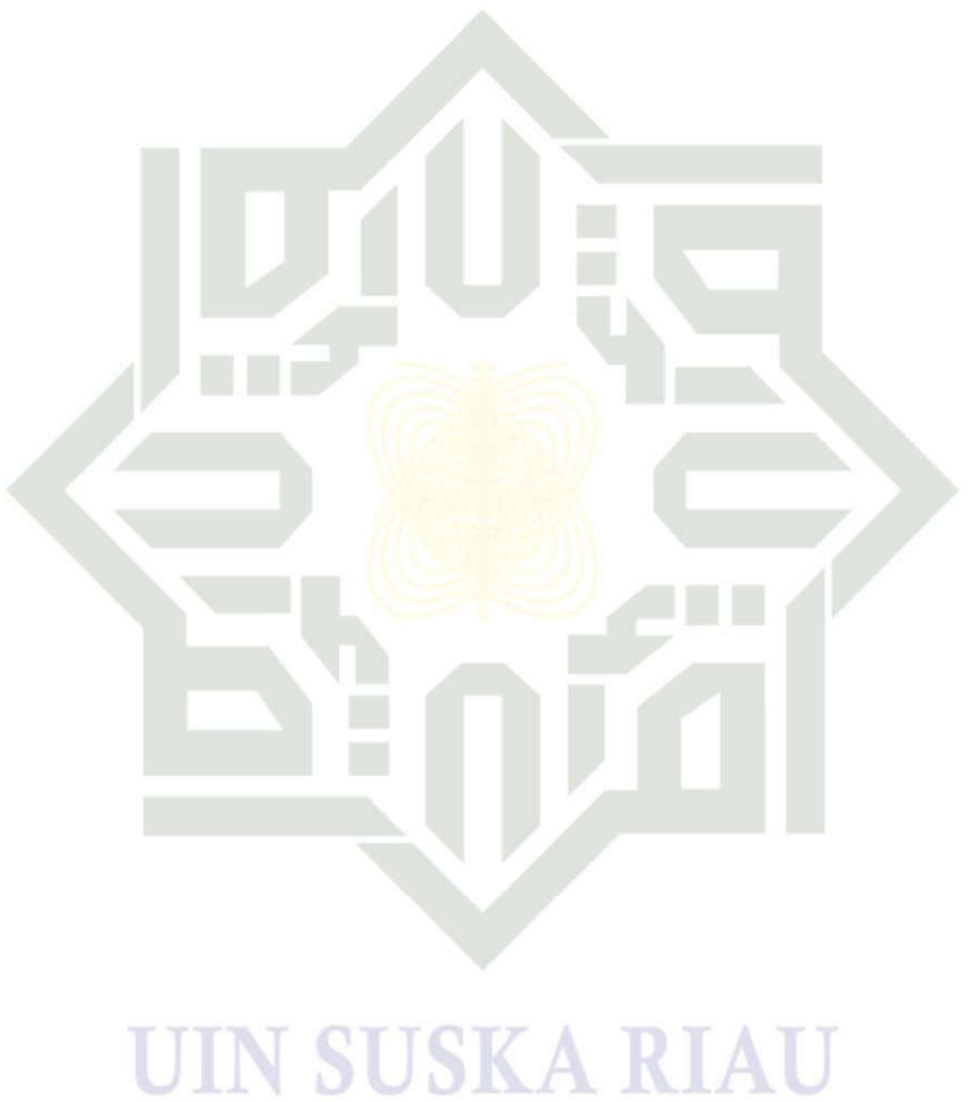
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Menurut penjelasan para ulama hukum ujah diperbolehkan dalam Islam.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat di simpulkan bahwa:

1. Penetapan tarif yang diberikan Bank BRILink pusat terhadap Agen BRILink telah ditetapkan oleh Bank BRILink pusat, yaitu melalui konsep BRILink yang disebut sharing fee. Konsep sharing fee ini seperti sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu merupakan sistem bagi hasil atau imbal jasa dengan presentase fee sebesar 50:50. 50 % untuk BRI dan 50% lagi untuk agen BRILink.
2. Analisis hukum Islam terhadap penetapan tarif jasa Bank BRILink pusat terhadap agen BRILink adalah menggunakan akad yaitu akad sistem imbal jasa (ijarah/ujrah). Ada timbal balik jasa dan besaran fee yang diberikan Bank BRILink pusat kepada agen BRILink, begitupun agen kepada Bank BRILink pusat. Didalam hukum islam semua ulama fiqih memperbolehkan transaksi ijarah/ujrah.



## B. Saran

Setelah penjelasan dan uraian diatas penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bank Penyelenggara Laku Pandai hendaknya lebih meningkatkan perhatian kepada para Agen yang berada di daerah-daerah pelosok di Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan keuangan inklusif yang baik dan adil.  
Para Agen sebaiknya melakukan edukasi kepada para nasabah dan calon nasabah sebelum membuka usaha layanan keuangan tanpa kantor (nirkantor) dan/atau BRILink.
2. Para agen sebaiknya menyertakan informasi-informasi dalam bentuk poster, leaflet dan/atau brosur. Seperti yang sudah ditetapkan oleh OJK dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada media Group.
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muamalat*. Serang: Amzah.
- Ali Hasan. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Al-Zuhaily, Wabah. 2003. *Al-fiqh Al-Islam Wa Adillah, Fiqh Al-Sunnah*.
- Amrullah dan Zainal Arifin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Departemen Agama RI., Al-qur'an Terjemah. (Jakarta: Cahaya Qur'an )
- Dimyauddin Djuwaini. 2010. *Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Belajar
- H. Asmuni A. Rahman. 2017. *Qaidah-qaidah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), .
- Hendi Suhendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ismail Nawawi. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Kaelan , M.S., 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma.
- Muhamad Amin Suma. 2008. *Menggali Akar Menggurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Jakarta: Kholam Publishing
- Nasun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Philip Kotler. 2007. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Indexs
- Rahmat Syafei. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA,).
- Rusd, Ibnu. 2017. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Semarang: Amedia
- Sabir Sayid. 1987. Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A Marzuki, *Terjemahan Fikih sunnah*, Jilid III. Bandung: Al Ma'arif.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

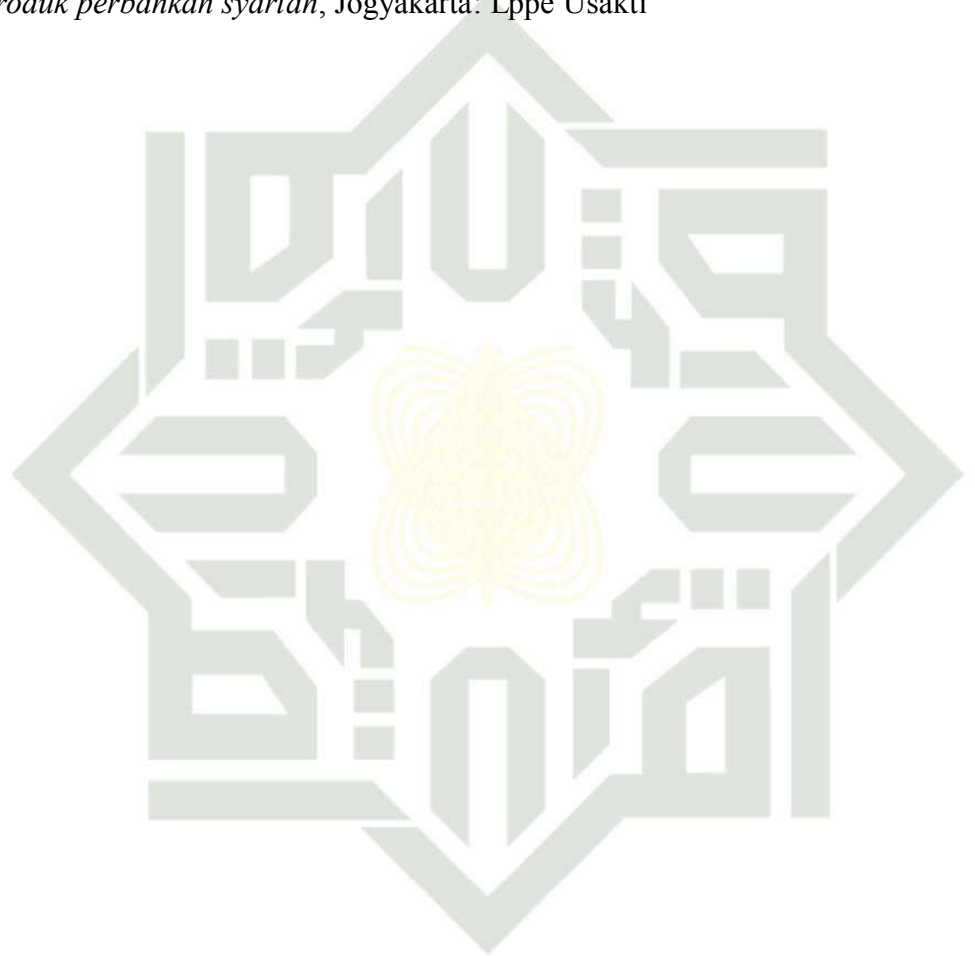
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, 2011, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Ciptsa.

Susandi AS, *Metodelogi penelitian*. 2014. Pusat Penelitian dan Penertiban IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung

Wiroso, 2011, *Produk perbankan syariah*, Jogjakarta: Lppe Usakti



UIN SUSKA RIAU

## Dokumentasi Penelitian



Foto dengan agen BRILink



Foto dengan agen BRILink

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto dengan agen BRILink



Foto dengan nasabah BRILink



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto dengan nasabah BRILink



RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto dengan nasabah BRILink



Foto dengan nasabah BRILink



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto dengan nasabah BRILink



Foto dengan nasabah BRILink



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto dengan nasabah BRILink

UIN SUSKA RIAU



## Lampiran Wawancara Agen BRILink.

1. Adakah syarat untuk menjadi agen BRILink ?
2. Adakah setiap agen BRILink di bayar menurut hasil transaksi atau perbulan ?
3. Adakah ada sanksi yang di tetapkan apabila agen BRILink berbuat kecurangan ?
4. Brapakah transaksi yang ddaapat dilakukan dalam 1 hari ?
5. Adakah yang bapak rasakan semenjak menjadi agen BRILink ?
6. Brapakah tarif yang pada saat melakukan pengiriman melalui BRILink pada bank yang sama ?
7. Brapakah tarif pada saat melakukan pengiriman melalui bank berbeda ?
8. Bisakah melakukan penarikan melalui bank selain BRI ?
9. Berapakah tarif pada saat melakukan transaksi tunai dengan Bnak yang berbeda?
10. Berapakah bagi untung yang dilakukan antara agen BRILink dengan BRILink pusat ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Lampiran wawancara nasabah BRILink.

1. Bagaimana apresiasi anda tentang adanya BRILink di Desa Tanjung Haloban ?
2. Dalam 1 bulan berapa kali anda melakukan transaksi menggunakan BRILink ?
3. Pernahkah anda menggunakan atm lain dalam melakukan transaksi di BRILink ? dan brapakah tarif yang di tetapkan oleh agen ?
4. Pernahkah anda mengalai kerugian pada saat menggunakan BRILink ? jika pernah bagaimana dan mengapa ?
5. Apakah anda pernah melakukan transaksi dengan agen BRILink yang berbeda ?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

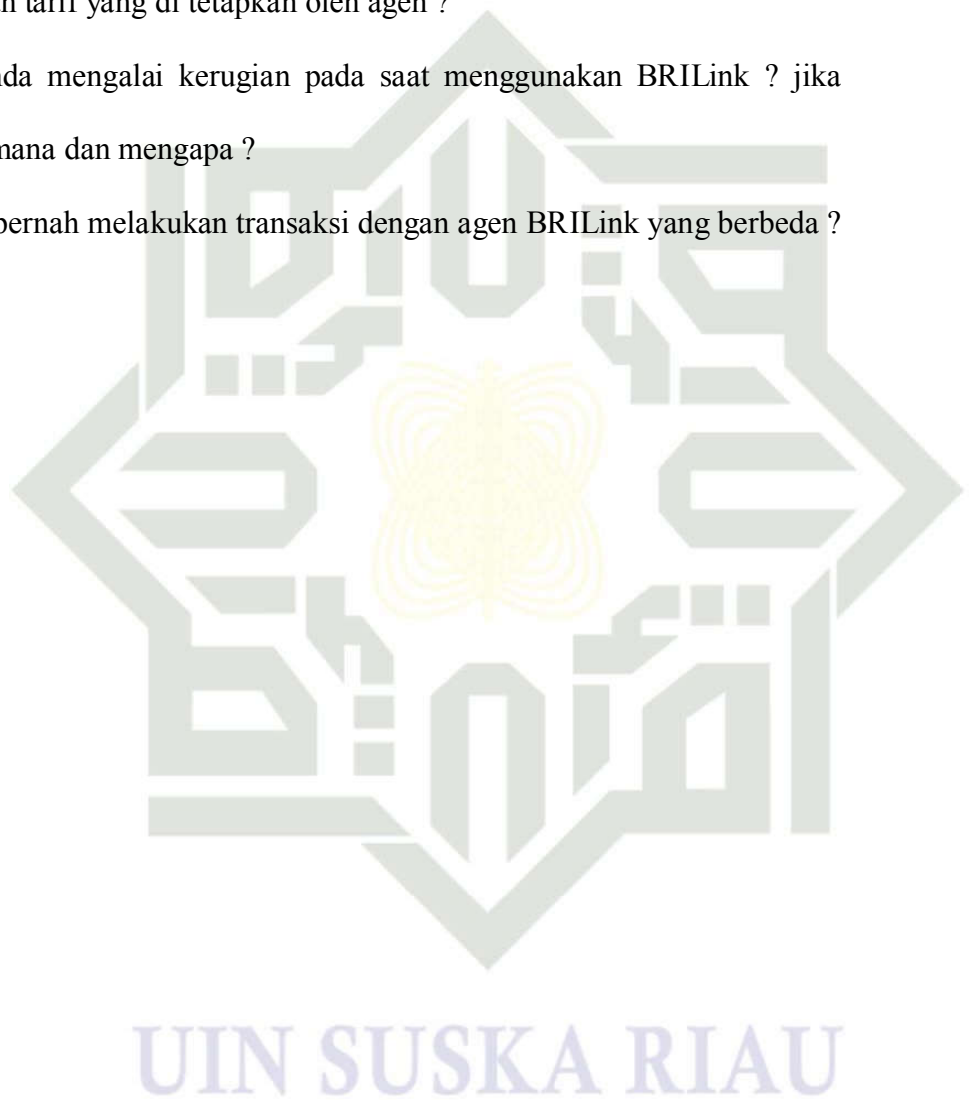
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

©Halal Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau







**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank, BRILink Desa Tanjung Haloban Kec Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara”**, yang ditulis oleh:

Nama : **MIRA**  
NIM : **11722200683**  
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Agustus 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si**

Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji I  
**Ahmad Adri Rifa'I, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Zulfahmi Bustami, MA**

Mengetahui :  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MIRA  
NIM : 11722200683  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)  
Judul : Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi BRILink Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara)

Pembimbing : Drs. H. Zainal Arifin, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mira

Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Haloban, 12 Agustus 1998

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya Laporan Akhir saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 3 Agustus 2021

Yang menyatakan



Mira  
11722200683





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/2079/2021  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 17 Februari 2021

Kepada  
Yth. Drs. H. Zainal Arifin, MA  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru


*Assalamu 'alaikum warhmatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : MIRA  
NIM : 11722200683  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN TARIF TRANSFER TUNAI MELALUI BANK (Studi BRI Link Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara)"  
Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I  
  
Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl  
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة والقانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1885/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 15 Februari 2021

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MIRA  
NIM : 11722200683  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Tanjung Haloban

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN TARIF TRANSFER TUNAI  
MELALUI BANK (Studi BRI Link Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir,  
Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/38829  
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1885/2021 Tanggal 15 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

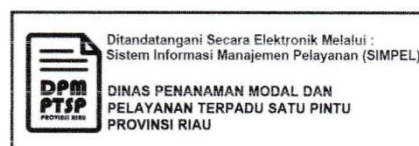
- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : MIRA   |
| 2. NIM / KTP         | : 11722200683  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMMALAH)  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN TARIF TRANSFER TUNAI MELALUI BANK (STUDI BRI LINK DESA TANJUNG HALOBAN, KECAMATAN BILAH HILIR, KABUPATEN LABUHANBATU, SUMATERA UTARA) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA TANJUNG HALOBAN KECAMATAN BILAH HILIR KABUPATEN LABUHANBATU SUMATERA UTARA  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 18 Februari 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara  
Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

**ian Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JI. WR. SUPRATMAN NO. 48 TELP. ( 0624 ) 21113-113

RANTAUPRAPAT

## REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/0667/BKBP-III/2021

- Membaca : Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 070-676/BKB.P/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, perihal Permohonan Izin Penelitian.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.  
3. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- Memperhatikan : Proposal Penelitian Ybs.

## MEMBERITAHUKAN BAHWA

Nama : **Mira.**  
Alamat : Pekanbaru.  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Judul Penelitian : **"Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi BRI Link Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara)".**  
Tempat Penelitian : BRI Link Desa Tanjung Haloban Kabupaten Labuhanbatu.  
Lamanya Penelitian : 3 Bulan.  
Maksud dan Tujuan : Riset

Akan melaksanakan Penelitian dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Pimpinan BRI Link Desa Tanjung Haloban Kabupaten Labuhanbatu, dengan menunjukkan Surat Rekomendasi ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila telah selesai melakukan kegiatan penelitian harus melapor/mengirimkan hasilnya kepada Bupati Labuhanbatu Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu.
5. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kembali.
6. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Dikeluarkan di : Rantauprapat  
Pada tanggal : 15 April 2021

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LABUHANBATU

H. NILWANSYAH, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19680401 199703 1 004

Tembusan :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu.
3. Pimpinan BRI Link Desa Tanjung Haloban Kabupaten Labuhanbatu.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4557009 - 4524894  
 Fax. (061) 4527480 Medan 20119

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070-676 /BKB.P/III/2021

1. Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
2. Menimbang : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38829 Tanggal 16 Februari 2021 Perihal Rekomendasi Penelitian.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA**

- a. Nama : Mira
- b. Alamat : Pekanbaru
- c. Pekerjaan : Mahasiswa
- d. Nip/Nim/KTP : 11722200683
- e. Judul : Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transper Tunai Melalui Bank (Studi BRI Link Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara.
- f. Lokasi/Daerah : Kabupaten Labuhan Batu
- g. Lamanya : 3 (Tiga) Bulan
- h. Peserta : Sendiri
- i. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/ Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan catatan, yang bersangkutan diwajibkan mematuhi Ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
  - a. Untuk pengawasan surat izin yang di keluarkan oleh Balitbang Provsu kami diberi tembusannya
  - b. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
  - c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peneliti, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Bakesbangpol Provsu
4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir b tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka rekomendasi ini tidak berlaku
5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan Ijin Penelitian.

Medan, 22 Maret 2021

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA UTARA  
 KABID PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL  
 KASUBBID KEWASPADAAN DINI, ANALISIS, EVALUASI, INFORMASI  
 DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

PUTRA LANDRI SITEPU, S.STP, MSI  
 PEMBINA  
 NIP. 198207122000121003

**Tembusan**

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (Sebagai laporan)
2. Bupati Labuhan Batu Up Kepala Badan Kesbangpol
3. Ka Balitbang Provsu
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Pertiinggal

1. Urat yang mengumpul sebagian atau seluruhnya tanpa menimbulkan dan menyebarkan sumbu.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BIOGRAFI

Mira dilahirkan pada Tanggal 12 Agustus 1998 di Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatra Utara. Lahir dari pasangan Bapak Supriatin dan Ibu Sukini dan merupakan anak ketujuh dari tujuh bersaudara. Mengawali pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2005 di Mis PP Alwasliyah Tanjung Haloban, Kecamatan

Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. dan lulus pada tahun 2011. Pada Tahun 2011 melanjutkan pendidikan ke SMP N 2 Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan lulus pada Tahun 2014. Kemudian pada Tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bilah Hilir, Provinsi Sumatera utara dan lulus tahun 2017. Pada tahun 2017 melalui jalur SPAN PTKIN penulis diterima menjadi Mahasiswa pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada Bulan Juli sampai dengan Agustus 2019 melaksanakan Praktek Kerja Lapang (PKL) di Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Bulan Juli sampai dengan Agustus 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Perkebunan Sennah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatra Utara. Penulis melaksanakan penelitian pada Bulan Februari 2021 sampai dengan Mei 2021 dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi BRILink Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara” di bawah bimbingan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.A Pada tanggal 28 Juli 2021 dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum melalui sidang tertutup Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.